

Pengaruh *Good Governance* terhadap Kemiskinan di Negara Berkembang

Rio Anugerah Utama¹, Joan Marta²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia.

*Korespondensi: rioanugerah48290@gmail.com, joan@unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

30 Oktober 2025

Disetujui:

31 Oktober 2025

Terbit daring:

2 November 2025

DOI: -

Sitasi:

Utama, R. A. & Marta, J. (2025). Pengaruh *Good Governance* terhadap Kemiskinan di Negara Berkembang.

Abstract:

This study examines the impact of good governance on poverty levels in developing countries. Good governance is measured using five World Bank indicators: Control of Corruption, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Political Stability and Absence of Violence/Terrorism, and Voice and Accountability. The analysis employs panel data regression from 16 developing countries over the period 2008–2022, using a quantitative approach through the Random Effect Model (REM). The findings indicate that both individually and jointly, good governance indicators have a significant effect on poverty. Control variables, namely Gross Domestic Product (GDP) per capita and Labor Force Participation Rate (LFPR), also play an important role. These results highlight that improving governance quality through transparency, policy effectiveness, and public participation is a strategic effort to sustainably alleviate poverty in developing countries.

Keywords: good governance, poverty, developing countries

Abstrak:

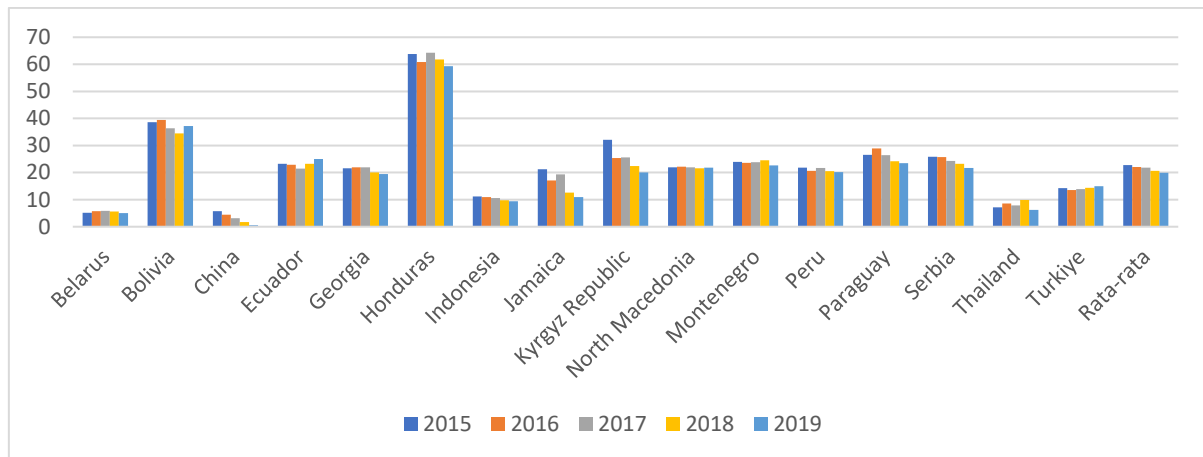
Penelitian ini menganalisis pengaruh *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik terhadap tingkat kemiskinan di negara berkembang. *Good governance* diukur melalui lima indikator World Bank, yaitu *Control of Corruption*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism*, serta *Voice and Accountability*. Metode analisis meliputi regresi data panel dari 16 negara berkembang periode 2008 hingga 2022 dengan pendekatan kuantitatif melalui metode regresi *Random Effect Model* (REM). Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa secara simultan, indikator *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Variabel kontrol, yakni *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita dan *Labor Force Participation Rate* (LFPR), juga memiliki kontribusi penting. Temuan ini menegaskan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan, melalui transparansi, efektivitas kebijakan, dan partisipasi publik, berperan strategis dalam pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan di negara berkembang.

Kata Kunci: good governance, kemiskinan, negara berkembang

Kode Klasifikasi JEL: I32, P36, G34

PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan sering terjadi di berbagai negara berkembang di dunia. Adanya fenomena ini membuat banyak masyarakat miskin sulit memenuhi kebutuhan ekonominya (Ali khomsan, 2015). Kemiskinan tidak hanya dipandang dari sisi materi atau ekonomi, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam peluang dan kemampuan untuk hidup dengan martabat (World Bank Poverty Overview). United Nations menjelaskan bahwa pada tahun 2015, lebih dari 736 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan global. Selain itu, dalam kelompok usia 25 hingga 34 tahun, terdapat 122 perempuan yang hidup dalam kemiskinan untuk setiap 100 laki-laki, sementara lebih dari 160 juta anak diperkirakan masih akan terjebak dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.



Grafik 1.1 Persentase Penduduk Miskin

Sumber: World Bank

Berdasarkan grafik, rata-rata tingkat kemiskinan di negara berkembang menunjukkan tren penurunan dari tahun 2015 hingga 2019. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial-ekonomi secara umum. Namun, penurunan tersebut tidak merata di seluruh negara. Beberapa negara seperti Honduras, Bolivia, dan Kyrgyz Republic masih mencatat tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, jauh di atas rata-rata, sementara negara lain seperti China, Belarus, dan Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara agregat terdapat kemajuan, tantangan kemiskinan di negara berkembang masih kompleks dan sangat dipengaruhi oleh faktor domestik masing-masing negara, sehingga upaya pengentasannya memerlukan strategi kebijakan yang tepat, inklusif, dan berkelanjutan.

Salah satu faktor yang dianggap berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan adalah penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Tata kelola pemerintahan yang baik merujuk pada pelaksanaan manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam memberantas permasalahan kemiskinan dan memperbaiki pembangunan (Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB, 1998).

Teori strukturalis, yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal dan Raúl Prebisch, melihat kemiskinan sebagai akibat dari struktur ekonomi dan sistem global yang timpang, terutama di negara-negara berkembang. Hubungan teori strukturalis dengan kemiskinan terlihat dalam kenyataan bahwa negara-negara berkembang terjebak dalam sistem ekonomi yang membuat mereka sulit berkembang. Untuk keluar dari jebakan ini, baik Myrdal maupun Prebisch menekankan perlunya intervensi negara yang lebih besar untuk menciptakan pembangunan yang lebih merata. Dengan demikian, penerapan prinsip *good governance* dapat membantu negara berkembang mengatasi hambatan struktural sekaligus mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Selain itu, teori Institusi oleh Acemoglu, Johnson, dan Robinson (2012) menjelaskan bahwa perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antarnegara terutama dipengaruhi oleh karakter institusi yang mengatur distribusi kekuasaan dan sumber daya. Institusi inklusif yang menjamin hak milik, membuka kesempatan ekonomi, dan mendorong partisipasi politik akan menciptakan inovasi serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, institusi ekstraktif yang dikuasai elite justru memperkuat kemiskinan struktural (Acemoglu, Johnson, & Robinson, 2005). Berdasarkan teori ini, *good governance* berperan penting dalam menurunkan kemiskinan karena memperkuat institusi inklusif melalui transparansi,

akuntabilitas, dan pemerataan akses terhadap sumber daya, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Good governance memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di berbagai negara. Nguyen et al., (2021) berpendapat bahwa hubungan antara tata kelola pemerintahan dengan kemiskinan ialah dengan tata kelola pemerintahan yang baik akan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan melalui peningkatan efektivitas kebijakan publik dan distribusi sumber daya yang lebih merata. Tata kelola yang baik dapat meningkatkan distribusi pendapatan yang lebih adil (Khan, 2011). Meskipun pertumbuhan ekonomi sering kali dianggap sebagai solusi utama dalam mengurangi kemiskinan, tanpa kebijakan tata kelola yang baik, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan. Di negara berkembang, setiap indikator *good governance* menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Tan (2024) menyebutkan bahwa dalam praktik konsep tata kelola pemerintahan yang baik dapat mengakibatkan perbedaan dalam kebijakan pembangunan, sehingga menyebabkan perbedaan dalam pembangunan institusi, yang kemudian berpengaruh terhadap permasalahan kemiskinan. Memahami hubungan antara *good governance* dan kemiskinan sangat krusial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana *good governance* berkontribusi dalam menekan tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang. Untuk mendukung analisis pengaruh *good governance* terhadap kemiskinan, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol berupa *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita dan *Labor Force Participation Rate* (LFPR).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena tertentu dalam bentuk data numerik. Data tersebut kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk memberikan makna yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good Governance* terhadap Kemiskinan di beberapa negara berkembang di dunia. Berdasarkan struktur data yang digunakan, Metode yang digunakan adalah analisis data panel tidak seimbang (*Unbalanced Panel*), yang menggabungkan data *cross-section* (data dari beberapa objek penelitian pada satu waktu tertentu) dan *time-series* (data dari satu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Periode analisis penelitian ini adalah tahun 2008 hingga 2022 dan menggunakan data *cross section* 16 negara berkembang di dunia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari situs resmi dari *World Bank Country and lending Group* dan *World Bank*. Variabel yang menjadi fokus utama (variabel dependen) adalah kemiskinan (Y), yang diukur berdasarkan persentase penduduk miskin di masing-masing provinsi. Sementara itu, variabel bebas (independen) terdiri dari lima indikator, yaitu *Control of Corruption* (X1), *Government Effectiveness* (X2), *Regulatory Quality* (X3), *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* (X4), dan *Voice and Accountability* (X5), serta *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita dan *Labor Force Participation Rate* (LFPR) sebagai variabel kontrol. Hubungan antara variabel-variabel tersebut dinyatakan dalam model matematika, yang dapat direpresentasikan melalui persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1(CC)_{it} + \beta_2(GE)_{it} + \beta_3(RQ)_{it} + \beta_4(PSA)_{it} + \beta_5(VA)_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana *i* merupakan 16 negara berkembang, *t* merupakan tahun 2008-2022. Dengan keterangan POV merupakan persentase kemiskinan, β_0 merupakan konstanta, β_1 -5 koefisien (*Regression Parameters*), CC merupakan *Control of Corruption*, GE merupakan *Government*

Effectiveness, RQ merupakan *Regulatory Quality*, PSA merupakan *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism*, dan VA merupakan *Voice and Accountability*.

Dengan pendekatan dan metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang kuat mengenai pengaruh *good governance* terhadap kemiskinan berkembang, serta menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif di kawasan yang masih menghadapi tantangan kemiskinan, terutama Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Pemilihan Model

Alat Uji	Chi-Square Statistic	Probabilitas	Keputusan
Chow	483.836748	0.0000	Fixed Effect Model
Hausman	5.114813	0.6460	Random Effect Model
Lagrange Multiplier	699.6457	0.0000	Random Effect Model

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews 13, 2025

Berdasarkan uji statistik pada tabel 1, nilai probabilitas pada Uji Chow yang terkait dengan variabel kemiskinan sebesar $0.0000 < 0.05$, maka model yang terpilih ialah *fixed effect model*. Selanjutnya, uji hausman menghasilkan nilai probabilitas sebesar $0.6460 > 0.05$ yang berarti bahwa model yang terpilih adalah *random effect model*. Karena model yang terpilih adalah REM, maka lanjut ke uji yang selanjutnya yaitu Uji Lagrange Multiplier yang menghasilkan nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$, yang berarti bahwa model yang terbaik dalam penelitian ini adalah *random effect model*.

Tabel 2. Hasil Estimasi Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
C	40.45223	6.771359	5.974019	0.0000
CC	-3.958506	1.929821	-2.051230	0.0418
GE	-0.267246	1.629372	-0.164018	0.8699
RQ	-0.556452	1.853599	-0.300201	0.7644
PSA	-3.414958	0.967144	-3.530970	0.0005
VA	-2.340279	1.856330	-1.260702	0.2092
GDP	-0.002881	0.000409	-7.043464	0.0000
LFPR	-0.088664	0.091257	-0.971586	0.3327
R-Squared				0.363616
F-Statistic				13.38658
Prob(F-Statistic)				0.000000

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews 13, 2025

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model, diperoleh persamaan data panel berikut

$$POV = 40.45223 - 3.958506*CC - 0.267246*GE - 0.556452*RQ - 3.414958*PSA - 2.340279*VA$$

Berdasarkan persamaan tersebut, nilai konstanta sebesar 40.45223 menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya pengaruh dari *Good Governance* yang diwakili indikator *Control*

of Corruption, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Political Stability and Absence of Violence/Terrorism, dan Voice and Accountability, serta Gross Domestic Product dan Labor Force Participation rate sebagai variabel kontrol, akan meningkat sebesar 40.45223 persen. Nilai probabilitas F sebesar $0.0000 < 0,05$ mengindikasikan bahwa secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sementara itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,36 menunjukkan bahwa 36% variasi tingkat kemiskinan di negara berkembang dapat dijelaskan oleh variabel *Control of Corruption, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Political Stability and Absence of Violence/Terrorism*, dan *Voice and Accountability*, sedangkan 64% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Pengaruh *Control of Corruption* terhadap Kemiskinan di negara berkembang

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model*, variabel *Control of Corruption* memiliki koefisien regresi sebesar -3.958506 dan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,0418. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa *Control of Corruption* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara sistematis, ketika variabel *Control of Corruption* mengalami peningkatan sebesar satu, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 3.95%, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Temuan serupa berdasarkan penelitian oleh Javaid & Faruq (2015) menegaskan bahwa korupsi memiliki hubungan kausal yang kuat dengan kemiskinan di negara-negara berkembang. Korupsi menyebabkan alokasi sumber daya menjadi tidak efisien, merusak efektivitas program pengentasan kemiskinan, serta memperburuk akses masyarakat miskin terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Mereka menyimpulkan bahwa korupsi bukan hanya memperdalam kemiskinan, tetapi juga menghambat upaya-upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, temuan penelitian ini konsisten dengan kajian literatur Aloui (2019) yang menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam aspek *control of corruption*, memiliki peran kausal yang signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pengendalian korupsi merupakan faktor krusial dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara sistemik.

Pengaruh *Government Effectiveness* terhadap Kemiskinan di negara berkembang

memiliki koefisien regresi sebesar -0.267246 dan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,8699. Karena nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa *Government Effectiveness* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara sistematis, ketika variabel *Government Effectiveness* mengalami peningkatan sebesar satu, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0.26%, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Dalam praktiknya, *government effectiveness* sering terhambat oleh lemahnya implementasi di lapangan dan ketimpangan akses layanan, terutama bagi kelompok termiskin. Efektivitas pemerintahan juga merupakan faktor struktural jangka panjang yang dampaknya muncul secara bertahap, sehingga sulit terdeteksi dalam penelitian dengan periode waktu terbatas. Selain itu, variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan pendidikan sering kali lebih berperan dalam menjelaskan variasi kemiskinan. Temuan Moktan dan Gani (2023) mendukung hal ini dengan menunjukkan adanya hubungan non-linier, di mana dampak signifikan efektivitas pemerintahan terhadap penurunan kemiskinan baru terlihat setelah melewati ambang batas tertentu.

Meskipun secara statistik hubungan tersebut tidak signifikan dalam model ini, temuan ini tetap sejalan dengan teori dan bukti empiris dari penelitian Sacks & Levi (2010) yang

menekankan pentingnya efektivitas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan menurunkan kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang. Efektivitas pemerintah yang mencakup kapasitas administrasi publik, kualitas pelayanan, serta akuntabilitas birokrasi berkorelasi positif dengan perbaikan indikator sosial seperti akses pendidikan, kesehatan, dan penurunan kemiskinan. Dengan demikian, meskipun tidak signifikan dalam model ini, penguatan efektivitas pemerintah tetap menjadi strategi penting dalam upaya jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan, sebagaimana didukung oleh literatur dan studi terdahulu.

Pengaruh *Regulatory Quality* terhadap Kemiskinan di negara berkembang

Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa variabel *Regulatory Quality* memiliki koefisien regresi sebesar -0.556452 dan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,7644. Karena nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa *Regulatory Quality* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, meningkatnya indeks *Regulatory Quality* suatu wilayah akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Nilai koefisien sebesar -0.556452 menunjukkan bahwa ketika variabel *Regulatory Quality* mengalami peningkatan sebesar satu, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0.55%, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Tidak signifikannya pengaruh *Regulatory Quality* terhadap kemiskinan disebabkan oleh hubungan yang tidak langsung dan membutuhkan waktu panjang untuk terlihat. Regulasi yang mendukung investasi memang dapat menciptakan lapangan kerja, tetapi dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan baru muncul ketika pertumbuhan ekonomi berlangsung secara inklusif. Sebaliknya, regulasi yang terlalu ketat atau liberal tanpa perlindungan sosial dapat memperlebar ketimpangan (QuantGov, 2021). Selain itu, indeks *Regulatory Quality* umumnya bersifat nasional sehingga kurang mencerminkan efektivitas implementasi di tingkat lokal. Penelitian McLaughlin et al. (2018) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa beban regulasi tinggi justru berkorelasi positif dengan kemiskinan karena menghambat usaha kecil. Hal ini menegaskan bahwa dampak regulasi sangat bergantung pada konteks pelaksanaan dan kelompok yang diuntungkan.

Meskipun hasil ini tidak signifikan secara statistik, temuan tetap sejalan dengan penelitian Dwumfour (2020) yang menunjukkan bahwa kualitas regulasi memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang seperti di Sub-Sahara Afrika. Kualitas regulasi yang buruk cenderung menghambat pertumbuhan sektor swasta, memperbesar kesenjangan ekonomi, dan memperparah kerentanan kelompok miskin terhadap stagnasi sosial dan ekonomi. Dengan demikian, penguatan kualitas regulasi tetap menjadi faktor strategis dalam kebijakan pengentasan kemiskinan, meskipun dalam konteks penelitian ini hasilnya belum signifikan secara statistik.

Pengaruh *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* terhadap Kemiskinan di negara berkembang

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model*, variabel *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* memiliki koefisien regresi sebesar -3.414958 dan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,0005. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, meningkatnya indeks *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* suatu wilayah akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Secara statistik, ketika variabel *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* mengalami peningkatan sebesar satu, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 3.41%, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Enders & Hoover (2012) yang meneliti hubungan antara kemiskinan dan ketidakstabilan politik, menemukan bahwa kemiskinan memiliki hubungan non-linear terhadap peningkatan insiden terorisme domestik bentuk ekstrem dari ketidakstabilan politik. Negara-negara dengan tingkat kemiskinan sedang justru menunjukkan peningkatan signifikan dalam aktivitas terorisme karena adanya cukup sumber daya dan ketidakpuasan sosial yang tinggi. Sebaliknya, stabilitas politik yang tinggi dan minimnya kekerasan serta terorisme memungkinkan terciptanya iklim ekonomi yang kondusif, menarik investasi, memperkuat institusi pemerintahan, dan memungkinkan program pengentasan kemiskinan berjalan efektif.

Pengaruh *Voice and Accountability* terhadap Kemiskinan di negara berkembang

Hasil regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* menunjukkan bahwa variabel *Voice and Accountability* memiliki koefisien regresi sebesar -2.340279 dan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,2092. Karena nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa *Voice and Accountability* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara statistik, ketika variabel *Voice and Accountability* mengalami peningkatan sebesar satu, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 2.34%, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Hasil tersebut sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Candelario & Cortez (2019) terhadap negara-negara di kawasan Asia Selatan. Dalam studi tersebut, *Voice and Accountability* juga ditemukan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, meskipun tidak selalu signifikan secara statistik. Dalam praktiknya, lemahnya kapasitas institusi untuk menindaklanjuti aspirasi kelompok berpenghasilan rendah membuat pengaruhnya terhadap kesejahteraan terbatas (Sida, 2008). Hickey dan King (2022) menegaskan bahwa penerapan *good governance*, termasuk aspek *Voice and Accountability*, membutuhkan transformasi kelembagaan yang kompleks dan jangka panjang. Hal serupa disampaikan UNDP (2008), yang menemukan bahwa meskipun hubungan antara partisipasi, akuntabilitas, dan pembangunan manusia bersifat logis, bukti empiris mengenai dampak langsungnya terhadap penurunan kemiskinan masih lemah dan sangat kontekstual. Meskipun dalam penelitian ini hasilnya tidak signifikan secara statistik, peningkatan *Voice and Accountability* tetap merupakan faktor penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang pro-kesejahteraan, dan dapat berperan sebagai katalisator dalam menurunkan tingkat kemiskinan jika didukung oleh sistem institusional yang kuat dan responsif.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelima variabel utama yang dianalisis yaitu *Control of Corruption*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism*, dan *Voice and Accountability* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan di negara berkembang selama periode 2008-2022. Integrasi kelima pilar tersebut mampu menciptakan lingkungan institusional yang kondusif untuk pelaksanaan program sosial, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, dan pengurangan ketimpangan. Variabel *Control of Corruption* menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Korelasi negatif yang signifikan ini menegaskan pentingnya reformasi anti-korupsi dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Variabel *Government Effectiveness* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Meskipun hubungan negatif teridentifikasi, efektivitas pemerintah perlu ditingkatkan secara lebih konkret untuk dapat berdampak signifikan terhadap kemiskinan. *Regulatory Quality* juga menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Kualitas regulasi yang baik seharusnya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan pasar, sehingga membuka peluang kerja dan memperluas ekonomi produktif. Selanjutnya, indeks *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* memiliki pengaruh

negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Stabilitas politik memberikan kepastian bagi investor dan memungkinkan pemerintah menjalankan kebijakan dengan efektif. Korelasi negatif yang kuat ini menunjukkan bahwa stabilitas politik merupakan prasyarat penting untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Terakhir, indeks *Voice and Accountability* menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Meskipun demokratisasi dan partisipasi publik penting, keberhasilannya dalam mengurangi kemiskinan mungkin memerlukan sinergi dengan institusi lainnya, seperti peradilan, birokrasi, dan lembaga pengawasan yang efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulwasaa, Mansour A. et al. (2024). Statistical and computational analysis for corruption and poverty model using Caputo-type fractional differential equations. *Heliyon*. 10 (3). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25440>
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Business. <https://cmc.marmot.org/Record/.b35244549>
- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth. In P. Aghion & S. N. Durlauf (Eds.), *Handbook of Economic Growth* (Vol. 1A, pp. 385–472). Amsterdam: Elsevier. <https://ideas.repec.org/h/eee/grochp/1-06.html>
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and Multidimensional Poverty Measurement. *Journal of Public Economics*, 476-487. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Aloui, Z., Hamdaoui, M., & Maktouf, S. (2024). Does governance matter to ensure significant impact of foreign direct investment on poverty reduction? Evidence from developing and emerging countries. *Transnational Corporations Review*. <https://doi.org/10.1016/j.tncr.2024.200058>
- Aloui, Zouhaier (2019). The impact of governance on poverty reduction : Are there regional differences in Sub-saharan Africa?. *FSEG SOUSSE*. <https://mpira.uni-muenchen.de/id/eprint/94716>
- Candelario, B. P., & Cortez, M. V. T. (2019). A panel regression analysis of poverty incidence among south asian countries. *Journal of Higher Education Research*, 4(1), 7–20. <http://www.nmsc.edu.ph/ojs/index.php/jherd/article/download/147/66>
- Coccia M. (2021). How a Good Governance of Institutions Can Reduce Poverty and Inequality in Society? In Nezameddin Faghieh, Ali Hussein Samadi (Editor) *Legal-Economic Institutions, Entrepreneurship, and Management, Perspectives on the Dynamics of Institutional Change from Emerging Markets*, Springer Nature Switzerland AG, DOI 978-3-030-60978-8_4, pp. 65-94 https://www.researchgate.net/publication/351374099_How_a_good_governance_of_institutions_can_reduce_poverty_and_inequality_in_society_for_supporting_a_sustainable_economic_development?tp=eyJjb250ZXhoIjp7ImZpcnNoUGFnZSI6Il9kaXJlY3QiLCJwYXVWdlIjoiX2RpcmVjdCJ9fQ
- Dwumfour, R. A. (2020). Poverty in Sub-Saharan Africa: The Role of Business Regulations, Policies and Institutions. *Social Indicators Research*, 149(3), 861–890. <https://doi.org/10.1007/S11205-020-02277-Z>

- Enders, Walter, and Gary A. Hoover. (2012). The Nonlinear Relationship between Terrorism and Poverty. *The American Economic Review*. 102(3), 267–72. <https://doi.org/10.1257/aer.102.3.267>
- Ewane, E. B . (2023). Good governance and poverty alleviation in the CEMAC sub-region: A fixed effect model with driscoll-kraay standard errors technique. *Asian Journal of Empirical Research*, 13 (2), 41–50. <https://doi.org/10.55493/5004.v13i2.4831>
- Grindle, M. S. (2004). Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries. *Governance*, 17(4), 525–548. <https://doi.org/10.1111/j.0952-1895.2004.00256.x>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Hickey, S., & King, S. (2022). Politics of Poverty Governance: An Introduction. *Journal of Poverty, Inequality and Development Studies*, 15(2), 145–160.
- Huynh, C. M., & Nguyen, P. T. P. (2024). Climate Change, Governance Quality, and Poverty: Empirical Insights from Vietnam's Provincial Level. *Journal of Poverty*, 1–15. <https://doi.org/10.1080/10875549.2024.2338148>
- Javaid, U., & Faruq, S. (2015). Corruption Pervades Poverty: In Perspective of Developing Countries. *South Asian Studies*, 30(1), 175. <https://www.questia.com/library/journal/1P3-3744809711/corruption-pervades-poverty-in-perspective-of-developing>
- Jindra, C., & Vaz, A. (2019). Good governance and multidimensional poverty: A comparative analysis of 71 countries. *Governance An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*. <http://dx.doi.org/10.1111/gove.12394>
- Kaufmann, D. & Kraay,. (2024). The Worldwide Governance Indocator Methodology and 2024 Update. *World Bank Group*. <http://reproducibility.worldbank.org/>
- Khan, M.H. (2011). Governance, Growth and Poverty Reduction. In J.K. Sundaram & A. Chowdhury (Ed.). *Poor Poverty: The Impoverishment of Analysis, Measurement and Policies* (pp. 61–86). London: Bloomsbury Academic. <http://dx.doi.org/10.5040/9781849664530.ch-003>
- Kwon, H., & Kim, E. (2014). Poverty Reduction and Good Governance: Examining the Rationale of the Millennium Development Goals. *Development and Change*, 45(2), 353–375. <https://doi.org/10.1111/dech.12084>
- Nguyen, C. V., Giang, L. T., Tran, A. N., & Do, H. T. (2021). Do Good Governance and Public Administration Improve Economic Growth and Poverty Reduction? The Case of Vietnam. *International Public Management Journal*, 24(1), 131–161. <https://doi.org/10.1080/10967494.2019.1592793>
- Puntigliano, A. R., & Appelqvist, O. (2011). Prebisch and Myrdal: Development Economics in the Core and the Periphery. *Journal of Global History*. 29-52. <https://doi.org/0.1017/S1740022811000039>
- QuantGov. (2021). Regulation and Inequality. <https://www.quantgov.org/regulation-inequality>

- Ramadhan, A., & Riani, N. (2024). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Negara-Negara ASEAN. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 6(1), 41-50. <http://dx.doi.org/10.24036/jkep.v6i1.15838>
- Rasikh, S., & Siddiqui, A. (2024). Exploring the Impact of Corruption and Governance on Poverty in Developing Countries: A Comparative Analysis of Pakistan, India, and Bangladesh. *American Journal of Development Studies*, 2(2), 57–61. <https://doi.org/10.54536/ajds.v2i2.3755>
- Roy, A. (2024). Multidimensional Poverty and Quality of Governance in Indian States. *The Indian Economic Journal*, o(o). <https://doi.org/10.1177/00194662241278062>
- Sacks, A., & Levi, M. (2010). Measuring Government Effectiveness and Its Consequences for Social Welfare in Sub-Saharan African Countries. *Social Forces*, 88(5), 2325–2351. <https://doi.org/10.1353/SOF.2010.0044>
- Sarker, M, N, I. et al. (2018). Poverty Alleviation of Rural People through Good Governance in Bangladesh. *The Journal of Social Science Research*. <http://dx.doi.org/10.32861/jssr.412.547.555>
- Shah, I.A. (2023), "Exploring governance effectiveness, tourism development and poverty reduction relationship in SAARC countries using panel dynamic estimation", *Journal of Tourism Futures*. <https://doi.org/10.1108/JTF-09-2022-0221>
- Sida. (2008). Joint Evaluation of Citizens' Voice and Accountability: Synthesis Report. <https://cdn.sida.se/publications/files/sida61326en-joint-evaluation-of-citizens-voice-and-accountability.pdf>
- Tan, Y. (2024) Comparative study of good governance on poverty reduction in Rwanda and Burundi. *Journal of Social and Economic Development*. <https://doi.org/10.1007/s40847-024-00355-3>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.
- United Nations. (n.d.). Ending poverty. *United Nations*. Retrieved February, 2025. <https://www.un.org/en/global-issues/ending-poverty>
- United Nations. (n.d.). SDG Global Database. *United Nations Statistics Division*. Retrieved February, 2025. <https://unstats.un.org/sdgs/dataportal/database>
- World Bank. (2001). *Governance and Poverty: A Background Paper for the World Development Report*.
- World Bank. (2025). *Worldwide Governance Indicators*. <https://info.worldbank.org/governance/wgi/>
- World Bank. "Poverty Overview." *World Bank*, <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview>
- World Bank. *World Bank Country and Lending Groups*. <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>